



**IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM
MENANGGULANGI MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BATU
(Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Gelar Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Oleh :

ACHMAD SUKRON

NPM. 22001091043



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2024**

RINGKASAN

Achmad Sukron, NPM. 22001091043. Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin di Kota Batu (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu). Dosen Pembimbing I Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin, S.H., M.Si., Dosen Pembimbing II Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu solusi untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Dalam pelaksanaannya PKH tidak terlepas dari permasalahan yang terjadi. Pertama, PKH belum terlihat signifikan dalam mengentaskan kemiskinan sehingga masih banyak keluarga miskin. Kedua, proses pencairan bantuan sosial ini sering terjadi keterlambatan dari jadwal yang ada. Ketiga, PKH dianggap tidak tepat sasaran karena data yang tidak valid dengan kondisi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin di Kota Batu (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu). (2) Faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam menanggulangi Masyarakat Miskin di Kota Batu.

Dalam Penelitian ini menggunakan grand teori/teori utama yaitu teori implementasi kebijakan menurut Edward III yang memperhatikan 4 issue pokok agar implementasi kebijakan yang efektif yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrat. Selain teori implementasi kebijakan, dalam penelitian juga didukung teori Kebijakan Publik, Teori Kemiskinan dan Program Keluarga Harapan.

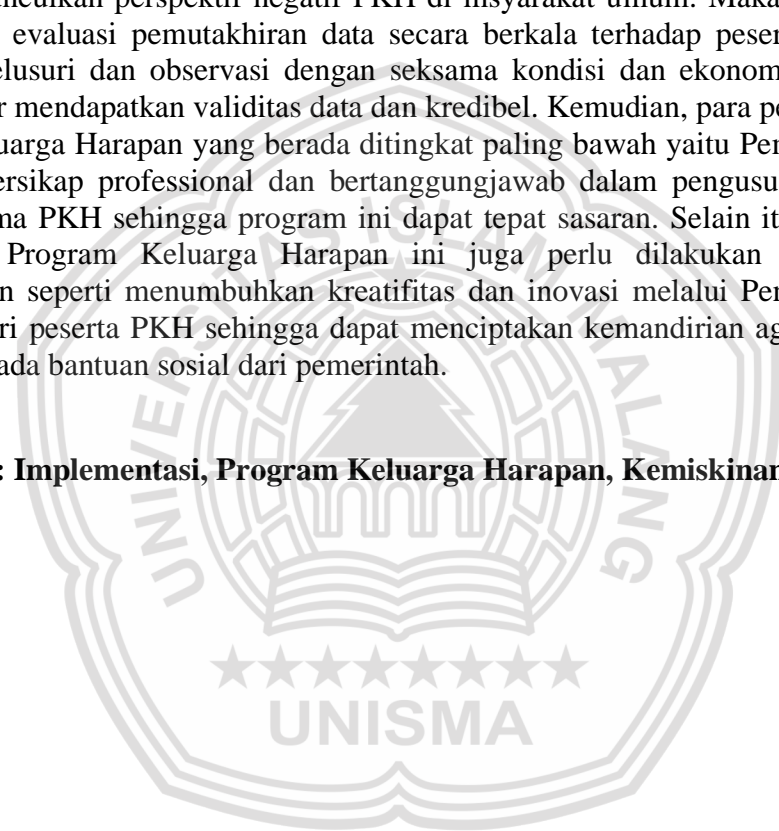
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Teknik analisa data yang digunakan yaitu menurut milles huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini berfokus pada empat indikator dalam implementasi kebijakan yang efektif menurut Edward III dalam Nugroho (2017) yang meliputi aspek Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrat. Kemudian faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Batu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin di Kota Batu secara umum sudah berjalan dengan baik sesuai pedoman pelaksanaan dan peraturan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya dilapangan terdapat ketidakakuratan data penerima sehingga PKH ini tidak sepenuhnya tepat sasaran. Hal ini dikarenakan ketidak profesionalan dalam proses pengusulan calon penerima PKH sehingga menimbulkan perspektif negatif pada Kebijakan PKH di masyarakat umum. (2) Faktor yang pendukung hal ini yaitu memiliki Sumber Daya Manusia yang kompeten, kemudian juga didukung sarana dan prasana yang memadai guna menunjang pelaksanaan PKH di Kota Batu serta kondisi geografis Kota Batu yang hanya mencakup 3 Kecamatan yang mana sangat memudahkan dalam monitoring dan mengurus administratif. Kemudian Faktor Penghambatnya yakni kondisi karakter para penerima PKH di Kota Batu yang berbeda-beda sehingga banyak

ditemukan penerima lupa akan kewajibannya dalam penerimaan PKH, selain itu data yang tidak valid dan akurat juga menjadikan Program Keluarga Harapan ini tidak tepat sasaran dan menimbulkan perspektif negatif di masyarakat umum.

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Batu sudah berjalan dengan baik dan dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku dilihat dari Komunikasi yang efektif, memiliki Sumberdaya yang berkualitas dan Struktur Birokrat yang baik. Namun pada disposisi program ini dianggap tidak efektif dan tidak tepat sasaran karena sikap dari aktor pelaksana yang kurang profesional dalam pengusulan calon penerima, hal ini memunculkan perspektif negatif PKH di msyarakat umum. Maka dari itu perlu adanya evaluasi pemutakhiran data secara berkala terhadap peserta PKH dengan menelusuri dan observasi dengan seksama kondisi dan ekonomi secara langsung agar mendapatkan validitas data dan kredibel. Kemudian, para pelaksana Program Keluarga Harapan yang berada ditingkat paling bawah yaitu Pemerintah Desa agar bersikap professional dan bertanggungjawab dalam pengusulan data calon penerima PKH sehingga program ini dapat tepat sasaran. Selain itu dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini juga perlu dilakukan langkah pemberdayaan seperti menumbuhkan kreatifitas dan inovasi melalui Pendidikan wirausaha dari peserta PKH sehingga dapat menciptakan kemandirian agar tidak bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah.

Kata Kunci : Implementasi, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan



SUMMARY

Achmad Sukron, NPM. 22001091043. *Public Administration Study Program, Faculty of Administrative Sciences, Islamic University of Malang. Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Overcoming the Poor in Batu City (Study at the Batu City Social Service). Supervisory Lecturer I Prof. Dr. H. Yaqub Cikusin, S.H., M.Si., Supervisory Lecturer II Taufiq Rahman Ilyas, S.AP., M.AP.*

The Family Hope Program (PKH) is one of the solutions to overcome poverty in Indonesia. In its implementation, PKH is inseparable from the problems that occur. First, PKH has not been significant in alleviating poverty so that there are still many poor families. Second, the social assistance disbursement process is often delayed from the existing schedule. Third, PKH is considered not right on target because the data is not valid with the conditions in the field. This study aims to determine (1) Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Overcoming the Poor in Batu City (Study at the Batu City Social Service). (2) Factors that support and hinder the implementation of the Family Hope Program (PKH) in tackling the Poor in Batu City.

This study uses the grand theory / main theory, namely the theory of policy implementation according to Edward III which pays attention to 4 main issues for effective policy implementation, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. In addition to policy implementation theory, the research is also supported by Public Policy theory, Poverty Theory and the Family Hope Program.

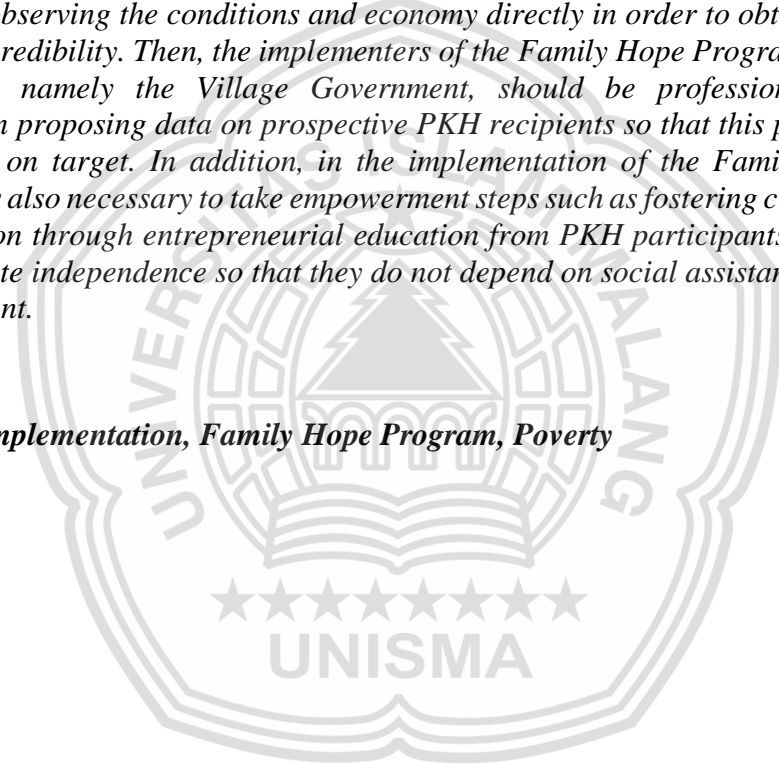
This research method uses descriptive research with a The data analysis technique used is according to Milles Huberman which includes, data collection, data presentation, data reduction and conclusion drawing. This study focuses on four indicators in effective policy implementation according to Edward III in Nugroho (2017) which include aspects of Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. Then the supporting and inhibiting factors in the implementation of the Family Hope Program (PKH) in overcoming the poor in Batu City.

The results of this study indicate that, (1) Implementation of the Family Hope Program (PKH) in Overcoming the Poor in Batu City has generally been going well according to the implementation guidelines and applicable regulations, but in its implementation in the field there is inaccurate recipient data so that PKH is not fully on target. This is due to unprofessionalism in the process of proposing prospective PKH recipients, causing a negative perspective on the PKH Policy in the general public. (2) The factors that support this are having competent Human Resources, then also supported by adequate facilities and infrastructure to support the implementation of PKH in Batu City and the geographical conditions of Batu City which only cover 3 sub-districts which make it very easy to monitor and administer. Then the inhibiting factor is the condition of the character of PKH recipients in Batu City which is different so that many recipients are found to forget

their obligations in receiving PKH, besides that invalid and accurate data also makes this Family Hope Program not on target and creates a negative perspective in the general public.

The conclusion in this study is that the implementation of the Family Hope Program (PKH) in Batu City has been running well and is carried out according to applicable procedures and rules seen from effective communication, has quality resources and a good bureaucratic structure. However, the disposition of this program is considered ineffective and not on target because of the attitude of the implementing actors who are less professional in proposing prospective recipients, this has led to a negative perspective of PKH in the general public. Therefore, it is necessary to periodically evaluate data updates on PKH participants by carefully tracing and observing the conditions and economy directly in order to obtain data validity and credibility. Then, the implementers of the Family Hope Program at the lowest level, namely the Village Government, should be professional and responsible in proposing data on prospective PKH recipients so that this program can be right on target. In addition, in the implementation of the Family Hope Program, it is also necessary to take empowerment steps such as fostering creativity and innovation through entrepreneurial education from PKH participants so that they can create independence so that they do not depend on social assistance from the government.

Keywords: Implementation, Family Hope Program, Poverty



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, menghadapi banyak masalah, termasuk kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu hambatan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah kemiskinan. Mewujudkan tujuan nasional yang digariskan dalam Pembukaan UUD 1945, antara lain melindungi bangsa Indonesia dan warga negaranya, memajukan kesejahteraan umum, mendorong perkembangan intelektualitas, dan turut serta dalam mewujudkan dunia yang merdeka, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka sangat penting untuk mengatasi masalah kemiskinan secara efisien.

Kemiskinan di Indonesia sendiri adalah masalah yang serius yang perlu ditangani. Kemiskinan adalah suatu kondisi di mana seseorang kelaparan, tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki akses ke sanitasi, dan tidak memiliki kebebasan. Dengan kata lain, faktor-faktor yang mendukung menyebabkan kemiskinan, seperti keterbatasan akses, pendapatan, pengeluaran yang subsisten, rentan terhadap penyakit, utang piutang yang sering, dan kadang-kadang masyarakat harus menjual barang-barangnya sendiri untuk bertahan hidup.

Cakupan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin bervariasi mengakibatkan kurangnya kepuasan terhadap layanan kesejahteraan yang diberikan pemerintah kepada warganya. akibatnya, individu-individu tertentu

tidak mampu menjalani kehidupan yang memuaskan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, “menjelaskan tentang Kesejahteraan Sosial telah disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.”

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 “menjelaskan tentang Kesejahteraan Sosial telah disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial”. Maka dari itu pemerintah harus hadir untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi dan kompleks di Indonesia. Maka pemerintah pada tanggal 21 September 2007 membuat kebijakan untuk mengendalikan kesejahteraan sosial dengan meluncurkan Kebijakan Program Keluarga Harapan. Kebijakan dimaksud resmi dilaksanakan pada 21 September 2007 dengan diterbitkannya Surat Keputusan No.31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tentang “Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan”.

Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan sesuai dengan konstitusi yang menuntut kesejahteraan rakyat. Inisiatif ini diwujudkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden N0. Pada tahun 2010, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau yang sering disebut TNP2K dibentuk. TNP2K merupakan lembaga yang berada di bawah kewenangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang fokus pada Program Keluarga Harapan, guna meningkatkan kualitas hidup RTSM dan individu rentan melalui peningkatan akses terhadap kesehatan, pendidikan, layanan kesejahteraan sosial, dan program perlindungan sosial melalui PKH. Aturan ini mencakup berbagai aspek, seperti mengatur maksud dan tujuan penerima manfaat PKH, hak dan tanggung jawab penerima, serta tata cara pelaksanaan PKH.

Tujuan utama PKH adalah untuk meningkatkan ketersediaan berbagai layanan, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, guna memfasilitasi pencapaian kesejahteraan bagi keluarga kurang mampu. Kehadiran PKH diharapkan dapat berkontribusi terhadap mitigasi angka kemiskinan yang ada dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang rumah tangga miskin. Meningkatkan ketersediaan pendidikan, layanan kesehatan, dan kesejahteraan sosial akan memberdayakan keluarga yang lebih baik untuk memberdayakan diri mereka sendiri.

Untuk mengurangi jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), khususnya kemiskinan yang terus meningkat, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesejahteraan Sosial, "Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang karena suatu kesulitan yang menghambat, atau gangguan dan tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya secara memadai." Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang memenuhi persyaratan mendapatkan bantuan uang tunai dari program. Sangat penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk kesehatan dan

Sasaran dari Program Keluarga Harapan adalah masyarakat miskin yang memiliki komponen, dan program ini terutama memberikan bantuan keuangan langsung kepada individu yang telah terdaftar sebagai pengguna PKH. Selain itu, sebagai bantuan sosial PKH, penerima Program Keluarga Harapan harus memenuhi syarat dan komponen. Anak-anak di SD, SMP, dan SMA/SMK, serta ibu hamil, nifas, atau menyusui, penyandang disabilitas, dan orang tua adalah bagian dari Program Keluarga Harapan ini (Pedoman Pelaksanaan PKH, 2021).

Ini adalah jadwal dan nominasi untuk bantuan sosial PKH tahun 2023:

Tabel 1. Jadwal Tahap Pencairan Bansos PKH

Periode/Tahan	Bulan
Tahap1	Januari–Maret
Tahap2	April–Juni

Tahap3	Juli–September
Tahap4	Oktober–Desember

Sumber : BPK RI, 2023

Bantuan sosial Program Keluarga Harapan didistribusikan dalam empat tahap, masing-masing berlangsung selama tiga bulan. Dengan demikian, dana ini didistribusikan setiap tiga bulan sekali. Jumlah yang diterima KPM dalam setiap tahapnya adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Nominal Bansos PKH Tahun 2023

Kategori	Nominal Tiap Tahap	Total Pertahun
Ibu Hamil/nifas/menyusui	Rp750.000	Rp3.000.000
Balita	Rp750.000	Rp3.000.000
Lanjut Usia	Rp600.000	Rp2.400.000
Disabilitas	Rp600.000	Rp2.400.000
Anak Sekolah SD	Rp225.000	Rp900.000
Anak Sekolah SMP	Rp375.000	Rp1.500.000
Anak Sekolah SMA/SMK	Rp500.000	Rp2.000.000

Sumber : BPK RI, 2023

Kota Batu merupakan salah satu kota yang mendapatkan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH). Kota Batu terletak di negara Indonesia. Terletak 15 km barat laut Malang /90 km barat daya Surabaya, kota ini terletak secara geografis. Suhu atmosfer rata-rata berkisar antara 12 hingga 19 derajat Celcius, sedangkan wilayah perkotaan terletak pada ketinggian antara 700

hingga 1.700 meter di atas permukaan laut. Kota Batu mengalami transformasi dari status sebelumnya sebagai bagian dari Kabupaten Malang menjadi kota administratif pada tanggal 6 Maret 1993. Kota Batu memperoleh otonomi pada tanggal 17 Oktober 2001 dan menjadikan dirinya sebagai kota tersendiri dari Kabupaten Malang. Kota Batu terdiri dari tiga kecamatan yang berbeda, yaitu Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Batu, dan Kecamatan Junrejo. Total ada delapan desa dan kelurahan di Kecamatan Batu, sedangkan Kecamatan Bumiaji terdiri dari sembilan desa dan kelurahan.

Program Keluarga Harapan Kota Batu telah beroperasi dari tahun 2013. Masyarakat Kota Batu sangat senang dengan kebijakan Program Keluarga Harapan, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk membantu orang miskin di Kota Batu. Namun, data BPS Kota Batu menunjukkan bahwa jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan terus meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang menerima PKH di Kota Batu.

“Kota Batu merupakan kota yang relatif kecil hanya memiliki 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Bumiaji, Kecamatan Batu dan Kecamatan Junrejo hal ini yang menjadi keuntungan kami dan memudahkan kami dalam melakukan pelaksanaan, monitoring dan manajemen dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Batu” (Wawancara Pada 22 Januari 2024 di Dinas Sosial Kota Batu)

Selama sejarahnya sebagai program sosial, Program Keluarga Harapan telah mengalami banyak perubahan dan tantangan. Seperti yang ditunjukkan oleh pekerjaan lapangan, program Keluarga Harapan terus dianggap tidak merata dalam penyaluran dana. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang merasakan manfaat Program Keluarga Harapan di Kota Batu. Meskipun

program ini belum berhasil mengurangi kemiskinan di Kota Batu, banyak penerima PKH belum memanfaatkan dana untuk keperluan lain.

“Dalam Kegiatan P2K2 yang dilakukan setiap satu bulan sekali para KPM selalu diberi edukasi tentang Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pengelolaan Keuangan. Namun kadang juga diselingi dengan kegiatan pemberdayaan dan kreatifitas untuk meningkatkan wirausaha dan kemandirian” (Wawancara pada 22 Januari 2024 di Dinas Sosial)

Hal ini membuktikan bahwa perlunya adanya edukasi yang lebih kepada para penerima bantuan untuk dapat memanfaatkan dana bantuannya sesuai dengan komponen dalam Program Keluarga Harapan ini. Dalam hal ini komunikasi yang efektif juga sangat perlu dibangun agar Program Keluarga Harapan dapat berjalan sesuai sasaran awal dan tidak menimbulkan perspektif negatif di masyarakat.

Selain itu, Program Keluarga Harapan ini mencakup berbagai masalah yang terjadi di seluruh Indonesia. Pertama, banyak komunitas masih dapat keluar dari kemiskinan. Kedua, bantuan tidak segera diberikan kepada keluarga penerima manfaat, dan ketiga, karena pengelolaan data DTKS yang tidak kredibel, penerimaan Program Keluarga Harapan tidak merata. Meskipun Program Keluarga Harapan telah berhasil menghasilkan banyak manfaat bagi keluarga penerima manfaat (KPM), masih ada beberapa masalah yang terjadi selama keberadaannya.

Pertama, data dari Badan Pusat Statistika tahun 2021 menunjukkan bahwa banyak masyarakat miskin di Kota Batu yang menerima bantuan sosial yang tinggi. Jumlah penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bumiaji terus meningkat pada tahun 2021. Untuk mengetahui

bagaimana Program Keluarga Harapan dapat dirasakan dan diterima langsung oleh masyarakat miskin, hal-hal menarik ini dapat dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini. Berikut ini adalah bukti dari wawancara pra-penelitian:

“Angka Kemiskinan di Kota Batu memang masih tergolong tinggi, hal ini juga dapat dilihat dari masyarakat penerima bantuan sosial baik bantuan sosial dari Pemerintah Pusat maupun Daerah. Apalagi pasca Covid-19 angka kemiskinan di Kota Batu masih tinggi” (Wawancara Pada 18 Desember 2023 di Dinas Sosial Kota Batu)

Kedua, Lambatnya pencairan dana PKH menjadi masalah utama dalam program ini. Dikutip dari (BeTV, 2023) menjelaskan alasan lambatnya pencairan bantuan PKH bahwa *pertama*, Beberapa nama tidak muncul sebagai penerima, bisa jadi salah satu penyebab tidak kunjung dapat bansos. Sehingga masyarakat yang hendak mendapat bansos tentunya terdaftar lebih dulu di DTKS Kemensos, *Kedua* ada kesalahan dalam penginputan data baik dari Masyarakat maupun pihak operator DTKS, *Ketiga* lanjut usia diketahui tidak menerima bantuan karena belum terdaftar e-KTP di Dispendukcapil, *Keempat* perubahan data pada administrasi kependudukan seperti status perkawinan, pekerjaan, NIK, hingga No. KK.

“Ketika bantuan sudah tidak dicair lagi, biasanya kami tidak diberi penjelasan yang jelas, jadi kami juga tidak diberikan alasan kenapa bantuan sudah tidak cair oleh pendamping PKH. Jadi tidak ada komunikasi kepada kami”(Wawancara pada 12 Desember 2023)

Ketiga, ada keyakinan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Hingga saat ini, publik telah mengetahui bahwa pemerintah melalui Kemensos terus memberikan bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, setelah banyak aduan tentang penerima bantuan PKH yang tidak memenuhi kriteria rumah tangga

yang sangat miskin. Menurut Kompas.com, Kemensos terus mengupdate data penerima bantuan sosial, termasuk PKH. Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bahwa karena data penerima PKH berada di pemerintah daerah masing-masing, penyebab penerima PKH tidak tepat sasaran. Selanjutnya, seperti dikutip dari (katadata.co.id 2020), banyak data yang salah, sehingga ada penerima manfaat yang tidak layak mendapatkan PKH atau BPNT. Sebaliknya, keluarga miskin tidak termasuk dalam program tersebut. Problem data ini salah.

“Program Keluarga Harapan ini memang diperuntukan bagi keluarga miskin yang memiliki komponen saja, jadi program PKH ini merupakan bantuan sosial bersyarat. Namun dilapangan memang sebagian bantuan PKH ini tidak merata, dalam hal ini yang memiliki akses untuk dapat mengusulkan peserta penerima adalah Pemerintah Desa. Kami disini hanya pelaksana dari data pusat yaitu Kementerian Sosial” (Wawancara Pada 18 Desember 2023 di Dinas Sosial Kota Batu)

“PKH ini juga menurut saya sangat tidak efektif ya, karena Cuma mereka saja yang dapat justru yang perlu dibantu ekonominya malah tidak tersentuh” (Wawancara Pada 18 Desember 2023 di Lapangan)

Dari berbagai masalah dan tantangan diatas maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Di Kota Batu (Studi Pada Dinas Sosial Kota Batu)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan informasi di atas, penulis menetapkan topik utama penelitian ini:

1. Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggulangi masyarakat miskin di Kota Batu ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dari Program Keluarga Harapan di Kota Batu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusah masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menangani masyarakat miskin di Kota Batu;
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Batu.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan teori mengenai pelayanan publik, pemerintahan daerah dan kebijakan publik.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan untuk kajian bagi penulis yang memiliki keterkaitan dan membahas mengenai pemerintah atau pemangku kebijakan dalam mengambil sebuah kebijakan atau program yang diterapkan.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan manfaat pada penulis untuk meningkat pemahaman menjelaskan permasalahan dan mengembangkan teori.
 - b. Memberikan pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan.

- c. Penelitian ini dapat dijadikan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan atau program penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan sosial.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta data yang dianalisis oleh peneliti tentang Program Keluarga Harapan di Kota Batu, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin di Kota Batu.

Secara umum menunjukkan secara prosedural mulai dari pendataan dan validasi hingga penyaluran dana bantuan sudah dilakukan sesuai prosedur dan pedoman. Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan proses sosialisasi, penyampaian informasi dan membangun komunikasi kepada KPM, Pemerintah Desa, Kecamatan, Lembaga Pendidikan, Kesehatan hingga Bank Mitra juga sudah dilakukan dengan maksimal sesuai pedoman. Namun untuk penyampaian informasi dan sosialisasi kepada KPM masih belum maksimal terbukti dalam pelaksanaannya masih banyak KPM yang belum mengerti tujuan, sasaran, pengelolaan keuangan dari bantuan Program Keluarga Harapan.

Kemudian pengelolaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Batu juga sangat bagus. Para pelaksana mengikuti Pendidikan Pelatihan yang diberikan untuk dapat meningkatkan kualitas SDM mereka. Kemudian mereka telah mampu menyalurkan pengatuhan dan keterampilan mereka kepada para KPM

melalui kegiatan P2K2. Selain itu pendamping PKH juga melakukan pemberdayaan kepada para KPM melalui kegiatan P2K2 dengan menumbuhkan jiwa wirausaha dan kemandirian.

Selain itu dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Batu ditemukan bahwa para stakeholder dari pelaksanaannya tidak menunjukkan sikap profesionalnya. Program Keluarga Harapan ini tidak sepenuhnya tepat sasaran, banyak ditemukan masyarakat yang dianggap mampu secara ekonomi dan finansial mendapatkan bantuan PKH ini. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya Program Keluarga Harapan ini terjadi campur kondisi politik dilapangan. Sehingga Program Keluarga Harapan menimbulkan perspektif negatif di masyarakat karena tidak tepat sasaran dan tujuan.

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Batu, pelaksana PKH juga telah memiliki susunan organisasi tersendiri Setiap struktur memiliki peran tugas pokok dan fungsi masing-masing. Hal ini dapat membantu selama pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Batu untuk dapat lebih terstruktur dan memudahkan dalam pelaksanaan di lapangan. Secara umum seluruh tupoksi dari masing masing aktor telah menjalankan tanggungjawab dengan tepat, kemudian birokrasi yang dijalankan juga sesuai pedoman dan peraturan yang telah ditetapkan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin di Kota Batu

Dalam implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Batu tidak terlepas dari faktor pendukung dalam pelaksanaannya. Faktor Pendukung dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Batu yaitu memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dimana para pelaksana program telah memiliki kompetensi dan keterampilan yang cukup untuk dapat melaksanakan program ini. Kemudian dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan juga didukung oleh sarana dan prasaran yang memadai, dimana para pelaksana mendapatkan fasilitas seperti ruang kantor, computer, printer, jaringan internet dan alat kantor lainnya hal ini sangat menunjang keberhasilan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Batu. Selain itu kondisi geografis yang relatif mudah sangat menguntungkan bagi para pelaksana karena kota batu secara administratif hanya memiliki 3 kecamatan saja.

Selain faktor pendukung, dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kota Batu juga memiliki hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut yaitu karakter KPM yang berbeda-beda, dimana para KPM di Kota Batu sangat bervariasi dari tahun ke tahun hal ini menjadikan para pelaksana PKH harus membuat strategi pendekatan untuk memberikan pelayanan kepada para KPM. Selain itu, hambatan yang terjadi yaitu data yang tidak valid, dimana banyak ditemukan KPM

yang dianggap mampu secara ekonomi dan finansial mendapatkan bantuan PKH, hal ini memunculkan perspektif di masyarakat bahwa Program Keluarga Harapan di Kota Batu ini tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

B. Saran

Saran-saran berikut ini disarankan oleh para peneliti sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk meningkatkan pengayaan teori dan memperlancar pelaksanaan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Batu. Saran-saran ini bertujuan untuk mendukung implementasi program dan kebijakan di masa depan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih baik seperti berikut :

1. Dalam konteks pengentasan kemiskinan perlu dilakukan Langkah yang berorientasi pada pemberdayaan pada masyarakat miskin agar dapat menciptakan kemandirian dan tidak bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah
2. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini perlu dilakukan monitoring, evaluasi dan tindak lanjut agar problematika yang terjadi dilapangan dapat ditangani sehingga dapat memberika pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Problematika tersebut antara lain terkendalanya dan lambatnya proses pencairan bantuan sosial tersebut.
3. Perlu adanya evaluasi pemutakhiran data secara berkala terhadap peserta PKH dengan menelusuri dan observasi dengan seksama kondisi sosial dan ekonomi para peserta agar sinkronisasi dan validitas data

dapat kredibel. . Artinya mendata dari rumah ke rumah dan melakukan observasi kehidupan sebenarnya agar mereka yang menerima bantuan ini benar-benar dari keluarga yang membutuhkan dan sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Pemerataan dari Program penerima bantuan ini adalah pendataan yang banyak ditemukan tidak akurat antara data yang ada dengan keadaan nyata di lapangan. Sehingga mereka yang seharusnya berhak menerima bantuan ini tidak muncul pada pendataan sebagai penerima bantuan PKH. Maka dari itu, pendataan peserta penerima Program Keluarga Harapan ini bisa ditelusuri secara seksama di lapangan. Kemudian dalam pelaksanaannya

4. Para pelaksana Program Keluarga Harapan khususnya stakeholder yang berada ditingkat paling bawah yaitu Pemerintah Desa agar bersikap profesional dan bertanggungjawab dalam pengusulan data calon penerima PKH agar tidak menimbulkan perspektif negatif dimasyarakat sehingga Program Keluarga Harapan ini tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 2012. ANALISIS KEBIJAKAN: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Bungin, Burhan. (2005). Metode Penelitian Kuantitatif Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya Edisi Pertama. Jakarta : Cetakan Pertama, Prenada Media.
- Badan Pusat Statistika . 2023. Kota Batu Dalam Angka Tahun 2023. <https://batukota.bps.go.id>
- Chamsyah B. 2008. Reinventing Pembangunan Sosial untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Jakarta: Trisakti University Press
- Dwijowijoto. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT.ELEX Media Komputindo.
- Hayat. 2018 . Kebijakan Publik : Evaluasi, Reformasi dan Formulasi . Malang : Empatdua Media
- Moloeng, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nugroho, Riant. 2017. Public Policy. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, E. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia (Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan). Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo.

Jurnal

Anggiana, Anggiana, Yaqub Cikusin, and Agus Zainal Abidin. "PROBLEMATIKA DISTRIBUSI BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)(Studi Kasus Di Desa Torongrejo Kecamatan Junrejo Kota Batu Jawa Timur)." *Respon Publik* 17.10 (2023): 1-8.

Abu Huraerah. *Strategi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*, 2013. Diakses 15 februari 2023.

Edu, Eduardus, and Abd Rohman. "Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)* 8.3 (2019): 67-74.

Fitriani, Aida Nur, Hayat Hayat, and Retno Wulan Sekarsari. "KONTRIBUSI BANTUAN LANGSUNG TUNAI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI DALAM MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT." *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan* 15.01 (2023): 225-243.

Jayaputra, A. (2014). *Pemetaan Kemiskinan dan Strategi Pengentasannya Berbasis Institusi Lokal dan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah di Provinsi Sumatera Barat*.

Karuru, P. (2013). *Pentingnya Kajian Pustaka Dalam Penelitian*. *Jurnal Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, 2(1), 1-9.

Kalsum, Umi, Nurul Umiati, and Hayat Hayat. "IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi Kebijakan UU No. 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan pada Desa Tamanasri

Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang)." *Respon Publik* 13.6 (2019): 70-76.

Laili, Fauziah Nur, Retno Wulan Sekarsari, and Taufiq Rahman Ilyas. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RANCANG BANGUN BUS PADA TRANSPORTASI PUBLIK DI TERMINAL ARJOSARI." *Respon Publik* 17.11 (2023): 45-54.

Lestari, Rani . (2018) . Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Malang). (Skripsi, Universitas Brawijaya)

Hidayati, Maulidia, Yaqub Cikusin, and Retno Wulan Sekarsari. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN DI DESA TOGUBANG DAN DESA TEGAR PRIYAH KECAMATAN GEGER KABUPATEN BANGKALAN." *Respon Publik* 18.1 (2024): 1-10.

M. Shofi, Sugeng Rusmiwari . (2019). *Proses Pelayanan E-Ktp Dalam Usaha Tertib Administrasi Kependudukan Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pengentasan Kemiskinan Bidang Pendidikan (Studi Di Desa Sumberejo Kecamatan Batu Kota Batu)*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Vol. 8 No. 1

Nasikun. Diktat Mata Kuliah. Isu dan Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan. Magister Administrasi Publik. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2001.

Izza, Nelly Nurul, Afifuddin Afifuddin, and Suyeno Suyeno. "Strategi Program Keluarga Harapan dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kota Batu (Studi pada Dinas Sosial Kota Batu)." *Respon Publik* 15.5 (2021): 16-22.

Rahmanda, Citra. 2019. Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kota Batu. *Jurnal Respon Publik*. Vol. 13, No. 5.

Suharto, Edi dan Thamrin, Djuni. 2012. *Program Keluarga Harapan: Memotong Mata Rantai Kemiskinan Anak Bangsa*. Jakarta: Aspirasi Vol.3 No. 1.

Sumodiningrat, Gunawan. "Jaring pengaman sosial dan pemberdayaan masyarakat." *Journal of Indonesian Economy and Business* 14.3 (1999).

Sasmito, Cahyo, and Ertien Rining Nawangsari. "Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu." *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 3.2 (2019): 68-74.

Ulumiyah, I. (2013). *Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa (studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Undang- Undang/Peraturan

Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan Tahun 2019

Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021.

Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2016, tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Desa

Website

Annisa. 2023. Sudah Terima Bantuan ? Ini Sebab Dana Bansos PKH 2023 Tak Kunjung Cair, Segera Cek. <https://betv.disway.id/read/21363/sudah-terima-bantuan-ternyata-ini-sebab-bansos-pkh-tahap-3-2023-tak-kunjung-cair-segera-cek> (Diakses Pada 12 Agustus 2023)

Badan Pusat Statistika . Data Kemiskinan Di Kota Batu Tahun 2022 . <https://batukota.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/45/profil-kemiskinan-kota-batu-2022.html>

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) . Bansos PKH 2023 . <https://jdih.bpk.go.id/Info/Details?id=ced43b29-1d2a-4fdb-999e-6df3fc983d7b>

Bayu, Dimas J. 2020. Hasil Studi : PKH dan Bantuan Sembako Tak Tepat Sasaran Terganjil Data. <https://katadata.co.id/agustiyanti/berita/5f1154c4a509b/hasil-studi-pkh-dan-bantuan-sembako-tak-tepat-sasaran-terganjal-data> . (diakses pada 17 Juli 2020)

Mulyono. 2009. Model Implementasi Kebijakan George Edward III. <https://mulyono.staff.uns.ac.id/2009/05/28/model-implementasi-kebijakan-george-edward-iii/> . (Diakses Pada 10 Oktober 2023)

Pemerintah Kota Batu . 2024. <https://batu.go.id> . (Diakses Pada 3 Januari 2024)

Yahya Achmad N. & Kuwado Febian Kuwado . 2020. Distribusi Bansos PKH Tak Tepat Sasaran Baru. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/04/11523711/distribusi-bansos-pkh-tak-tepat-sasaran-mensos-siapkan-aturan-baru> . (Diakses Pada 04 Juni 2020)